

Peran Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Praktik Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Authors:

Ade Maya Saraswati

Affiliations:

Universitas Muhammadiyah
Prof. Dr. Hamka

Corresponding Author:

Ade Maya Saraswati

Emails:

ademaya.saraswati@uhamka.ac.id

Article History:

Received: December 18th, 2022

Revised : January 26th, 2024

Accepted: July 25th, 2024

How to cite this article:

Saraswati, A. M. (2024). Peran Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Praktik Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, 7(2), 1-12. doi: <https://doi.org/10.35138/organum.v7i2.332>

Journal Homepage:

<http://ejournal.winayamukti.ac.id/index.php/Organum/index>

Copyright:

© 2024. Published by Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi. Faculty of Economics and Business. Winaya Mukti University.



Abstract. Tax targets that were not achieved were caused by actions to manage the tax burden by corporate taxpayers. One strategy is to minimize the tax burden in a legal way. This study aims to examine the moderating effect of corporate governance on political connections and tax aggressiveness. The research sample was 77 using purposive sampling technique. The analysis technique uses Eviews. Data processing using multiple regression and moderation regression. The results showed that political connections had no effect on tax aggressiveness, corporate governance had no effect on tax aggressiveness and the moderating effect of corporate governance did not moderate political connections on tax aggressiveness. Company management can pay attention to additional factors that may have a greater impact on tax policy and regulators may consider strengthening supervision or more specific policies to ensure effective corporate governance in managing taxes.

Keywords: Political connections; corporate governance; tax aggressiveness.

Abstrak: Target pajak yang tidak tercapai disebabkan oleh tindakan pengelolaan beban pajak oleh wajib pajak badan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti moderasi tata kelola perusahaan terhadap koneksi politik dan agresivitas pajak. Sampel penelitian berjumlah 77 dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis menggunakan Eviews. Pengolahan data menggunakan metode regresi berganda dan regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan efek moderasi tata kelola perusahaan tidak memoderasi koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Manajemen perusahaan dapat memperhatikan faktor-faktor tambahan yang mungkin memiliki dampak lebih besar pada kebijakan perpajakan dan regulator, dimungkinkan mempertimbangkan penguatan pengawasan atau kebijakan yang lebih spesifik untuk memastikan tata kelola perusahaan yang efektif dalam mengelola pajak

Kata Kunci: Koneksi politik; agresivitas pajak; tata kelola perusahaan.

Pendahuluan

Berdasarkan publikasi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2019) realisasi penerimaan pajak tahun 2019 senilai 84,44% dari target, nilai tersebut menurun sebesar 7,60% dibandingkan dengan tahun 2018. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak (Saraswati *et al.*, 2024). Target pajak

yang tidak tercapai disebabkan oleh tindakan pengelolaan beban pajak oleh wajib pajak badan (Lestari & Putri, 2017). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sektor pajak. Namun bagi wajib pajak badan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba sebelum pajak sehingga perusahaan seringkali berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajaknya (Pranoto & Widagdo, 2016).

Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal. Besarnya beban pajak tergantung kepada besarnya penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan penting sekali melakukan perencanaan pajak yang tepat agar dapat melakukan penghematan dan pengurangan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk mencapai kepentingan tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan agresivitas pajak (Wahab et al., 2017).

Agresivitas pajak diartikan sebagai strategi perencanaan pajak yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Metode dan teknik yang digunakan adalah cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan serta tidak melanggar hukum perpajakan (Wicaksono, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak agresif salah satunya adalah koneksi politik (Brown et al., 2014; Kim dan Zhang, 2016; Wahab et al., 2017). Koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan dapat melindungi perusahaan dari risiko deteksi tindakan pajak agresif (Kim dan Zhang, 2016). Namun, berdasarkan penelitian (Anggraeni, 2018; Ganjar, 2021) koneksi politik tidak memiliki dampak terhadap implementasi agresivitas pajak.

Tata kelola perusahaan merupakan mekanisme kontrol terhadap pengelola

perusahaan sehingga akan sangat memengaruhi keputusan strategis perusahaan (Santoso dan Muid, 2014). Pihak manajer bisa meminimalkan beban pajak dari praktik agresivitas pajak dengan strategi menggelapkan beberapa keuntungan yang diperoleh dengan perencanaan pajak. Untuk menghindari hal ini, tata kelola perusahaan digunakan untuk menyesuaikan kepentingan manajer dan divergensi pemegang saham (Desai & Dharmapala, 2005).

Tata Kelola perusahaan yang baik akan menjadikan perusahaan selalu mengambil pertimbangan matang atas segala kegiatan perusahaannya. Menurut (Sari & Martani, 2010; Lanis & Richardson, 2012; Halioui et al., 2016; Richardson et al., 2013) mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Putranto et al. (2023) tata kelola perusahaan yang diprosikan dengan Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengaruh politik yang kuat dalam bisnis. Kedekatan antara pelaku bisnis dengan pemerintah cukup tinggi, di mana terdapat fenomena payung politik para pebisnis sengaja membina koneksi politik untuk kepentingan perpajakan (Hidayati & Diyanty, 2018). Objek penelitian merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, karena sektor pertambangan merupakan sektor yang berada di bawah regulasi pemerintah sehingga memiliki koneksi politik yang kuat (Harymawan et al., 2017).

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mendorong peneliti untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayati & Diyanty, 2018) mengenai koneksi politik, dan agresivitas pajak. Namun, penelitian ini menggunakan variabel moderasi tata kelola perusahaan.

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan pertambangan, karena perusahaan pertambangan seringkali beroperasi dalam lingkungan bisnis yang sangat terpengaruh oleh regulasi pemerintah serta perusahaan pertambangan sering kali melibatkan investasi besar dan risiko yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti moderasi tata kelola perusahaan terhadap koneksi politik dan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Dalam konteks teori agensi, manajer dengan koneksi politik cenderung merasa memiliki dukungan atau perlindungan politik, yang dapat mendorong mereka untuk mengejar kepentingan pribadi atau tujuan perusahaan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Saraswati & Albab, 2024)

Perusahaan dengan koneksi politik yang berkuasa tinggi akan memiliki tingkat agresivitas pajak yang signifikan tinggi sehingga berdampak pada menurunnya transparansi laporan keuangan, seperti modal yang dibutuhkan lebih besar karena kurangnya investor. Namun, hal ini membuat perusahaan tidak peduli dengan risiko yang terjadi, karena perusahaan tersebut memiliki hubungan koneksi politik yang mampu mengurangi serta menghilangkan risiko tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Butje & Tjondro, 2014; Fadillah dan Lingga 2021) mengungkapkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan akan memengaruhi

keputusan strategis suatu perusahaan. Penerapan yang dirancang dengan baik akan membuat agent mematuhi segala peraturan yang ada, termasuk tidak melakukan tindakan agresif terhadap tindakan tax planning, tujuannya untuk meningkatkan kinerja agent.

Tata kelola perusahaan dengan indikator dewan komisaris berperan dalam memberikan arahan kepada dewan direksi serta meyakinkan bahwa tata kelola perusahaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dewan komisaris dibantu oleh komisaris independent dalam perencanaan dan penilaian strategi serta meminimumkan penghindaran pajak menurut KKNK dalam (Siregar & Syafruddin, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Rombebunga, 2019) mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan dengan proporsi komisaris independent berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, karena semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka agresivitas pajaknya meningkat. Menurut Minnick & Noga dalam (Rombebunga, 2019), menjelaskan bahwa komisaris independent selalu berusaha untuk memaksimalkan kemampuannya dalam melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui agresivitas pajak melalui wawasan dan pengalaman mereka. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : Tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak dimoderasi Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan dikategorikan menjadi dua bagian, yakni internal dan eksternal. Tata kelola internal termasuk pemerintah atau dewan. Sedangkan, tata kelola eksternal lebih ke arah kepemilikan pihak nonpemerintah, yakni kepemilikan institusional dan

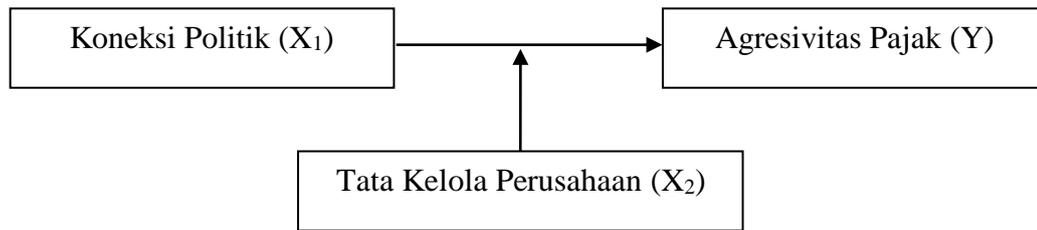
ukuran auditor (Harsono & Gitasari, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Harto dalam (Harsono & Gitasari, 2021) mengungkapkan bahwa dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan kedudukan dewan komisaris independent tidak efektif dalam meminimumkan permasalahan internal

perusahaan sehingga upaya dalam mengarahkan manajerial tidak bisa dilakukan oleh dewan komisaris untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H₃ : Tata kelola perusahaan memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang didapat dari situs resmi www.idx.co.id. Analisis verifikatif dalam penelitian ini dilakukan dengan model regresi berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan data panel.

Adapun sumber data penelitian Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun pengamatan 2014-2020. (i) perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2020; (ii) perusahaan sampel konsisten melaporkan keuangannya selama periode 2014-2020; (iii) Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian fiskal selama periode pengamatan, karena jika mengalami kerugian fiskal perusahaan tersebut tidak ada beban pajak, sehingga tidak relevan dalam penelitian ini; (iv) Perusahaan sampel tidak memiliki kompensasi kerugian selama lima tahun sebelumnya dengan jumlah akumulasi kompensasi tersebut tidak melebihi laba fiskal tahun pengamatan, karena perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian dan akumulasi kompensasi yang melebihi laba

fiskal selama tahun pengamatan tidak memiliki beban pajak.

Model penelitian pertama untuk menguji pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap praktik agresivitas pajak (tanpa variabel pemoderasi) dengan analisis regresi berganda. Adapun rumus persamaan sebagai berikut:

Model 1: Hipotesis 1 dan 2

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Model penelitian kedua untuk pengujian dengan menambahkan variabel pemoderasi. Adapun rumus persamaan sebagai berikut:

Model 2: Hipotesis 3

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 * X_2 + \epsilon$$

Yang terdiri dari :

- Y = Agresivitas pajak yang diukur dengan rasio
- X₁ = Koneksi politik
- X₂ = Tata kelola perusahaan
- X₁*X₂ = Interaksi koneksi politik dengan tata kelola perusahaan
- α = Konstanta
- β₁ β₂ β₃ = Koefisien regresi
- ε = Standar Error

Keterangan dari masing-masing variabel pada seluruh model di atas adalah sebagai berikut:

- a. agresivitas pajak diukur dengan ETR, yaitu membandingkan antara beban pajak pada periode t dengan laba sebelum pajak tahun t.
- b. koneksi politik diidentifikasi ketika sebuah perusahaan memiliki setidaknya satu anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pemegang saham blok (dengan kepemilikan saham di atas 20%), atau kerabat dekat dari pihak-pihak tersebut yang saat ini atau sebelumnya menjabat sebagai anggota parlemen, pejabat negara, atau pengurus partai politik yang memiliki keterwakilan di parlemen, dengan pengecualian bagi anggota TNI, dan Polri. Faccio (2006). Merupakan variabel dummy yang bernilai 1 bila memiliki koneksi politik dan bernilai 0 bila sebaliknya.
- c. *CEO Duality* yaitu adanya seseorang yang menduduki jabatan sebagai CEO (*Chief Executive Officer*) yang sekaligus menjabat sebagai *Chairman of Board* di satu perusahaan (Chang *et al*, 2009). *CEO Duality* dinyatakan dengan variabel dummy, yaitu apabila di suatu perusahaan terdapat CEO duality sama dengan 1 dan 0 jika tidak.
- d. dewan komisaris bertugas memantau dan mengawasi kinerja manajemen, sementara dewan direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional perusahaan (Yuliani & Prastiwi, 2021). Dewan komisaris diukur dari jumlah dewan komisaris yang ada pada perusahaan.
- e. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak

terafiliasi dengan manajemen anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Diukur dengan cara membagi jumlah anggota dewan komisaris independent dengan total jumlah anggota dewan komisaris (Yulianti & Cahyonowati., 2023).

Analisis data dilakukan dengan tiga metode dalam regresi data panel yaitu, metode *fixed effect*, *random effect* dan *common effect*. Pengujian pemilihan metode regresi data panel dilakukan dengan melakukan uji *chow*, uji hausman dan uji Lagrange Multiplier. Setelah metode regresi terbaik ditemukan akan dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan ketidaknormalan distribusi nilai residual. Setelah model regresi yang digunakan telah ditentukan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik, maka tahap terakhir adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari analisis regresi, uji koefisien determinasi (R²), uji simultan (Uji F), dan uji parsial (Uji t). Penelitian ini akan menggunakan pengujian dengan menggunakan alat statistik Eviews 10 dengan melakukan persamaan regresi berganda.

Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah hasil statistik deskriptif setiap variabel operasional:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	AP	KP	GCG
Mean	0.349896	0.077922	1.599091
Medium	0.285000	0.000000	1.500000

Maximum	1.654000	1.000000	2.790000
Minimum	0.083000	0.000000	0.830000
Std. Dev.	0.195149	0.269807	0.544446
Skewness	4.243215	3.149260	0.541967
Kurtosis	27.50778	10.91784	2.377039
Jarque-Bera	2158.087	328.4164	5.014607
Probability	0.000000	0.000000	0.081488
Sum	26.94200	6.000000	123.1300
Sum Sq. Dev.	2.894321	5.532468	22.52804
Observations	77	77	77

Sumber: Hasil *Output Eviews 10*

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa koneksi politik (X_1), dengan jumlah data (N) sebanyak 77 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,078 dengan nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 1,000 serta standar deviasi sebesar 0,270. Data statistik deskriptif variabel koneksi politik menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi, artinya data menyebar atau bervariasi.

Tata kelola perusahaan (X_2), dengan jumlah data (N) sebanyak 77 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1,599 dengan nilai minimum sebesar 0,830 dan nilai maksimum sebesar 2,790 serta standar deviasi sebesar 0,544. Data statistik deskriptif variabel tata kelola perusahaan sebagai pemoderasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi, artinya data tidak bervariasi atau tidak menyebar.

Agresivitas Pajak (Y), dengan jumlah data (N) sebanyak 77 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,350 dengan nilai minimum sebesar 0,083 dan nilai maksimum sebesar 1,654 serta standar deviasi sebesar 0,195. Data statistik deskriptif variabel agresivitas pajak menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi, artinya data tidak menyebar atau tidak bervariasi.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan ketiga model yang diuji yaitu uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier model yang terbaik digunakan adalah model *random effect*.

Hasil pengujian model penelitian pertama

Hasil pengujian model penelitian pertama dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan pengujian model pertama bahwa koneksi politik yang disimbolkan dengan KP tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk melakukan agresivitas pajak. Koneksi politik tidak memainkan peran yang menonjol dalam menentukan apakah suatu entitas atau individu akan cenderung bersikap agresif dalam hal perpajakan. Artinya bahwa perubahan dalam tingkat koneksi politik (kenaikan atau penurunan) tidak akan secara signifikan memengaruhi kecenderungan untuk mengambil langkah-langkah agresif dalam hal perpajakan.

Prosedur politik tentang perpajakan tidak diterapkan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan yang memberikan secara langsung keringanan pajak, sehingga perusahaan yang terbukti mempunyai hubungan politik dengan pemerintah tidak memiliki tarif pajak efektif lebih rendah (Fadila et al., 2017). Hasil penelitian selaras dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2019) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Marfu'ah, 2015) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Butje & Tjondro, 2014) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan memiliki otonomi dan independensi dalam mengelola kebijakan keuangan dan pajak mereka sendiri. Keputusan terkait agresivitas pajak lebih sering dipengaruhi oleh strategi keuangan perusahaan, tujuan fiskal, dan kebijakan internal daripada oleh koneksi politik. Selain itu, dinamika politik bisa sangat fluktuatif, dan perusahaan mungkin enggan bergantung pada kebijakan yang dapat berubah-ubah dengan perubahan pemerintahan atau regulasi pajak. Oleh karena itu, perusahaan cenderung fokus pada kebijakan internal mereka daripada bergantung pada koneksi politik yang mungkin tidak stabil.

Berdasarkan hasil pengujian olah data untuk variabel tata kelola perusahaan yang disimbolkan dengan GCG tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal itu dapat diartikan bahwa variasi dalam praktik tata kelola perusahaan tidak memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah agresif dalam perpajakan seperti memanfaatkan

celah perpajakan atau struktur pajak yang kompleks untuk mengurangi kewajiban pajak.

Menurut Eksandy dalam (Rombebunga, 2019) mengungkapkan bahwa jumlah anggota komisaris independent dapat memaksimalkan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap usaha memperoleh laba perusahaan dengan cara melakukan penghindaran pajak. Eksistensi tata kelola perusahaan tidak memengaruhi tindakan manajemen dalam melakukan agresivitas pajak. Perusahaan bisa saja lebih terfokus pada efisiensi pajak sebagai prioritas utama, daripada mempertimbangkan secara mendalam praktik tata kelola. Keputusan untuk mengadopsi strategi agresif dalam perpajakan dapat dipandang sebagai upaya untuk mengoptimalkan struktur pajak dan meminimalkan kewajiban pajak tanpa memperhatikan secara eksklusif praktik tata kelola.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yudhistira & Anggraeni, 2022) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dengan proksi komisaris independent tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rombebunga, 2019) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dengan proporsi komisaris independent berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Model 1

	Koefisien	t hitung	P-value
	Regresi		
(Constant)	0.274864	2.629968	0.0104
KP	0.054648	0.573025	0.5684
GCG	0.044259	0.727056	0.4695
Fhitung	0.654370		
R	0.011396		
Adjusted R ²	-0.015323		

Sumber: Hasil *Output Eviews 10*

Hasil pengujian model penelitian kedua

Model kedua dalam penelitian ini berfungsi untuk menguji efek moderasi dari koneksi politik perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hasil moderasi dari koneksi Politik dan Tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak dijelaskan melalui variabel GCG*KP. Dari hasil uji regresi terlihat bahwa tidak memoderasi artinya tidak ada pengaruh moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara koneksi politik dan tata kelola perusahaan dengan agresivitas Pajak.

Mekanisme tata kelola perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak, hal ini karena mekanisme tata kelola perusahaan menggambarkan besarnya saham yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga mekanisme tata kelola perusahaan cenderung tidak memperhatikan kebijakan perencanaan pajak perusahaan tetapi lebih fokus pada komisi dari laba perusahaan yang menyebabkan konsepnya cenderung pada manajemen

laba, bukan pada agresivitas pajak (Putri, 2018).

Jika suatu perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan pihak-pihak politik, maka sangat dimungkinkan kebijakan dan cara perusahaan mengelola akan berbeda karena mendapatkan pendanaan atau dukungan politik, kebijakan regulasi yang mendukung dan kemudahan dalam memperoleh akses informasi sehingga hak ini dapat memengaruhi bagaimana perusahaan mengelola pajaknya. Oleh karena itu, hubungan politik dan cara perusahaan membayar pajak sudah sangat penting dan memengaruhi keputusan perusahaan dengan sendirinya. Sehingga tidak ada faktor lain yang memengaruhi memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sadjarto et al (2019); Santoso dan Maudid (2014) yang menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak ataupun memediasi variabel lain terhadap agresivitas pajak.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Model 2

	Koefisien Regresi	T hitung	P-value
(Constant)	0.249025	2.243523	0.0279
KP	0.284506	0.715921	0.4763
GCG	0.060028	0.928600	0.3562
KP*GCG	-0.146819	-0.590197	0.5569
Fhitung	0.448980		
R	0.018117		
Adjusted R ²	-0.022234		

Sumber: Hasil *Output Eviews 10*

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dan tata kelola perusahaan tidak memoderasi hubungan koneksi politik dengan agresivitas pajak.

Keterbatasan dari penelitian ini hanya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mendeteksi agresivitas pajak, penelitian selanjutnya dapat menambahkan pengukuran lainnya sesuai penelitian seperti *Cash Effective Tax Rate*, *GAAP Effective Tax Rate* dan *Book Tax Different*. Selain itu, dalam pengukuran koneksi politik masih terdapat subjektivitas dikarenakan adanya keterbatasan informasi yang dapat

digunakan dan bersifat andal yang dapat menyebabkan timbulnya kemungkinan perusahaan yang sebenarnya memiliki koneksi politik tidak terdeteksi dalam penelitian. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan definisi dari koneksi politik dengan menggunakan metode observasi dan wawancara untuk menemukan definisi yang lebih objektif mengenai koneksi politik. Keterbatasan dari penelitian yaitu penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-2020.

Implikasi hasil penelitian untuk perusahaan pertambangan dapat melakukan Penyesuaian Strategi Perpajakan yaitu perusahaan dapat mengevaluasi kembali strategi perpajakan mereka tanpa bergantung terlalu banyak pada koneksi politik atau tata kelola perusahaan. Manajemen perusahaan dapat memperhatikan faktor-faktor tambahan yang mungkin memiliki dampak lebih besar pada kebijakan perpajakan, seperti lingkungan bisnis, industri, dan regulasi perpajakan, transparansi dan kepatuhan pajak yaitu fokus pada transparansi dan kepatuhan pajak dapat menjadi prioritas, terlepas dari hubungan politik atau tata kelola perusahaan. Ini dapat meminimalkan risiko terkait pelanggaran atau tindakan pajak yang tidak sesuai dengan regulasi. Sedangkan Implikasi untuk regulator, regulator dapat mengambil wawasan dari temuan ini untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin memiliki dampak lebih besar pada agresivitas pajak perusahaan dan regulator dimungkinkan mempertimbangkan penguatan pengawasan atau kebijakan yang lebih spesifik untuk memastikan tata kelola perusahaan yang efektif dalam mengelola pajak.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, R. (2018). *Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Aggressiveness (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang). Diakses dari <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3798/2458>
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–9. Diakses dari <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3943>
- Chang, K., Lee, J., & Shim, H. J. I. R. o. F. (2019). *CEO duality and firm performance: Does economic policy uncertainty mediate the relation?*, 19(4), 877-891. doi: <https://doi.org/10.1111/irfi.12193>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2005). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *NBER: National Bureau of Economic Research*, 11241. 1–32. Diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=689562
- Faccio, M. (2006). *Politically-connected firms. American Economic Review*, 96(1), 369–386. Diakses dari <https://www.aeaweb.org/articles/pdf/doi/10.1257/000282806776157704>
- Fadila, M., Rasuli, M., & Rusli, R. (2017). Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang*

- Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1671–1684. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/130249/pengaruh-return-on-asset-leverage-ukuran-perusahaan-kompensasi-rugi-fiskal-kepem>
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332-343. doi: <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012>
- Ganjar, D. S. (2021). *Pengaruh Koneksi Politik, Gender Diversity, Corporate Social Responsibility, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi*. (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta). Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspac/e/handle/123456789/56476>
- Ghozali, P. H. I., & Ratmono, D. D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika (Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10)*. Semarang: BP UNDIP.
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. B. (2016). Corporate Governance, CEO Compensation And Tax Aggressiveness : Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance*, 15(4), 445-462. doi <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Harsono, B., & Gitasari, R. P. (2021). Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1343-1357. Diakses dari <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4567>
- Harymawan, I., Agustia, D., & Agung, A. K. (2017). Characteristics of Politically Connected Firms In Indonesia. *Problems And Perspectives In Management*, 15(4), 17-23. doi: [http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15\(4\).2017.02](http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.02)
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh Moderasi Koneksi Politik Terhadap Kepemilikan Keluarga dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 22(1), 46–60. doi: <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art5>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78-114. doi: <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012), Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86-108. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2028–2054. Diakses dari <https://jurnal.harianregional.com/akuntansi/id-25562>
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity

- Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. Diakses dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/15772>
- Marfu'ah, L. (2015). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 1(1), 12–27. Diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Pengaruh-Return-On-Asset%2CLeverage%2C-Ukuran-Rugi-Dan-Marfu%27ah/daa047fc22bda597855f8ca0a4d7c2fd6ce2c2fb>
- Pajak, D. J. (2018). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. Diakses dari https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf%20/lakn_djpb_2018.pdf
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. Diakses dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7310/44%20-%20Bayu%20Agung%20Pranoto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Putranto, P., Affini, D. N., & Hatimah, H. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Transfer Pricing terhadap Tax Aggressiveness dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 1–15. Diakses dari <https://aktiva.nusaputra.ac.id/article/view/176>
- Putri, V. R. (2018). Keterkaitan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Perbankan*, 4(1), 20–28. Diakses dari <https://journal.ibs.ac.id/index.php/JEMP/article/view/119>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689-704 (2014). doi: <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68-88. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.004>
- Rombbunga, M. (2019). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 2(3), 249–267. doi: <https://doi.org/10.24246/persi.v2i3.p249-267>
- Sadjiarto, A., Florencia, & Nevanda, O. (2019). Effects of Political Connections and Corporate Governance on Tax Aggressiveness in Indonesian Service and Banking Sectors. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 190-204. Diakses dari <https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2099723>
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. 3(4), 148-159. Diakses dari

- <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/10201>
- Saraswati, A. M., & Albab, F. N. U. (2024). Peran Kecakapan Manajerial dan Koneksi Politik terhadap Praktik Manajemen Laba Dimoderasi Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 5(1), 95-110. doi: <https://doi.org/10.24853/jago.5.1.95-110>
- Saraswati, A. M., Zidnia, R., & Wulan, M. (2024). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Z Sebagai Calon Wajib Pajak Sebagai Upaya Menumbuhkan Kepatuhan Perpajakan Pada Siswa-Siswi SMK Setia Negara. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1). doi: <http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v6i1.10343>
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Ownership Characteristics, Corporate Governance, And Tax Aggressiveness. *Accounting Conference Doctoral Colloquium*. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/349199732>
- Siregar, A. A., & Syafruddin, M. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–11. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/27534>
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451. Diakses dari <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 167–180. Diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/5833>
- Yudhistira, A., & Anggraeni, F. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Rasio Keuangan, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *National Conference on Accounting & Fraud Auditing*, 3(1), 1–10. Diakses dari <https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/view/1184>
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institutional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141-148. doi: <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>
- Yuliyanti, A., & Cahyonowati, N. (2023). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institutional Terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3). Diakses dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>